**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

2021-2026



**KATA PENGANTAR**

Perhubungan sebagai urat nadi, sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang Dinas Perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi keseluruh pelosok.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Banjar Nomor 45 tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia keseluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2022-2026, penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan. Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan.

Sasaran Pembangunan Perhubungan tahun 2021-2026 adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan.

Secara umum RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor Perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2022-2026, berdimensi bidang urusan di lingkungan dinas.

Martapura, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perhubungan,

Drs. H. ASPIHANI, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630616 198812 1 001

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, maka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran dari dokumen tersebut diatas.

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah disusun untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi bersangkutan yang dikenal populer dalam Ilmu Manajemen dan Bisnis dan populer dalam penyusunan Dokumen rencana pembangunan, dan digunakan dalam proses penyusunan Renstra SKPD, dan memperhatikan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan dengan Renja SKPD.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga tahun 2026, pemasalahan dan tantangan, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Banjar.

Susunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2021-2026 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Perhubungan; visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perhubungan; strategi penyelenggaraan; serta program dan kegiatan.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut:

* + 1. LANDASAN IDEOLOGI

Landasan ideologi Dishub Kabupaten Banjar adalah dasar negara kita yaitu PANCASILA

* + 1. LANDASAN KONSTITUSIONAL

Landasan konstitusional Dishub yaitu UUD 1945

* + 1. LANDASAN OPERASIONAL

Landasan Operasional Dishub adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no.3 tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (lembaran-negara tahun 1953 no. 9), sebagai undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubsh kembali dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.
10. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
11. Perda No. 04 Tahun 2013 tentang RPJP Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
12. Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
       1. Maksud

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dishub Kabupaten Banjar secara konsukuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
   * 1. Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dishub Kabupaten Banjar turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I. PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Penutup

8.2. Pedoman Transisi Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Periode Dokumen Perencanaan

**BAB 2**

**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

**2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, khususnya Pasal (4) menyebutkan bahwa :

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang perhubungan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka kalau dilihat dari struktur organisasinya termasuk ke dalam organisasi lini, staf dan fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri dari:
6. Seksi Sarana dan Prasaranan Perhubungan;
7. SeksiTeknologi Kendaraan dan Perbengkelan;
8. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari:
9. Seksi Jaringan Transportasi dan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas;
10. Seksi Manajemen dan Rekayasa Perhubungan Darat;
11. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat.
12. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri dari:
13. Seksi Angkutan Orang dan Barang Perhubungan Darat;
14. Seksi Bimbingan Keselamatan Operasional dan Pengendalian Perhubungan Darat;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Parkir
16. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Adapun struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar seperti pada gambar dibawah ini :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

SUBBAG UMUM &KEPEGAWAIAN

BIDANG LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

BIDANG ANGKUTAN & KESELAMATANPERHUBUNGAN DARAT

BIDANG SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

SEKSI TEKNOLOGI KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

SEKSI JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANDALALIN

SEKSI ANGKUTAN & KESELAMATAN PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN OPERASIONAL & PENGENDALIAN PERHUBUNGAN DARAT

KEPALA UPT UKB

KASUBBAG TATA USAHA UPT

KEPALA UPT TERMINAL DAN PARKIR

KASUBBAG TATA USAHA UPT

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR :

**Bagian Pertama**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR**

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Sebagai Berikut :

a. merumuskan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

b. merumuskan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;

c. menyelenggarakan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;

d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;

e. mengawasi dan mengendalikan bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;

g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;

h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan darat;

i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;

j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perhubungan darat;

k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Sekretariat**

Uraian Tugas Sekretariat Sebagai Berikut:

a) menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;

b) memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;

c) menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas;

d) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

e) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;

f) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas;dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagai Berikut:**

a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;

b) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

c) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;

e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Dinas;

f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;

g) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;

i) menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas.

j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;

k) membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;

l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;

m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Sebagai Berikut :**

a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan, keuangan dan Aset;

b.menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

c.melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;

d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

f. menyusun Profil Perhubungan Darat berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

h. menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

i. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Darat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

j. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan

o. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

p. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

Q. melakukan rekonsiliasi aset tetap dan belanja antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Bagian Ketiga**

**Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Uraian Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Sebagai Berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan Jaringan dan Fasilitas Perlengkapan Perhubungan Darat, serta Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

b. menyusun rencana kerja dan program Jaringan dan Fasilitas Perlengkapan Perhubungan Darat, serta Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

c. mengkoordinasikan kegiatan Jaringan dan Fasilitas Perlengkapan Perhubungan Darat, serta Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

d. menyelenggarakan teknis urusan Jaringan dan Fasilitas Perlengkapan Perhubungan Darat, serta Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Jaringan dan Fasilitas Perlengkapan Perhubungan Darat, serta Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian Tugas Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat Sebagai Berikut:**

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat;

b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat;

c. menyiapkan penyusunan rencana umum dan rencana teknis integral atau pemaduan antar moda transportasi darat;

d. menyiapkan penyusunan rencana teknis simpul-simpul transportasi darat;

e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi darat;

f. melaksanakan pengkajian, penelitian dan studi dalam rangka perkembangan transportasi darat;

g. melaksanakan survey/pendataan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan, perhubungan darat di wilayah kabupaten;

h. mengadakan perencanaan dan penempatan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas jalan, marka jalan, zebra cross, pita penggaduh, PJU serta tanda-tanda pada jalan di wilayah Kabupaten;

i. membuat usul pengadaan, penempatan dan media dan alat pembantu pengamanan lalu lintas jalan (area traffic control system (ATCS)) di wilayah kabupaten;

j. menyediakan fasilitas perlengkapan jalan, perhubungan darat di wilayah Kabupaten;

k. Menyiapkan, menetapkan dan mengawasi rambu lalu lintas.

l. Mengadakan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.

m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk / arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik Dinas maupun dengan lembaga / instansi terkait jaringan dan fasilitas Perhubungan Darat

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :**

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan;

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan darat di wilayah kabupaten (halte, terminal, dermaga, pagar pengaman jalan, dan pulau lalu lintas);

g. menetapkan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk angkutan perkotaan dan atau perdesaan, dan pelabuhan Pengumpan Lokal;

h. menyiapkan bahan rekomendasi usaha dermaga untuk pelabuhan pengumpan lokal;

i. menyiapkan bahan rekomendasi pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP;

j. menyiapkan bahan rekomendasi pekerjaan pembersihan alur di wilayah perairan dan atau wilayah pelabuhan pengumpan lokal;

k. menyediakan angkutan umum perintis untuk jasa angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah kabupaten;

l. menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman penyelenggaraan, pengaturan dan pemberian rekomendasi sarana teknologi kendaraan dan prasarana perbengkelan kendaraan darat dan sungai;

m. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap karoseri sarana kendaraan bermotor yang akan diuji ulang untuk pertama kali;

n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan izin operasi dan tanda-tanda khusus terhadap sarana kendaraan tidak bermotor;

o. melaksanakan administrasi dan menyiapkan rekomendasi tentang status sarana kendaraan bermotor umum atau tidak umum, perubahan presentasi (nilai) perubahan bentuk dan perubahan kendaraan bermotor;

p. melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran jumlah prasarana perbengkelan umum dan bengkel pengujian kendaraan bermotor (PKB) swasta;

q. melaksanakan penyelenggaraan surat keterangan kaca berwarna (film coating);

r. melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tekhnologi kendaraan dan perbengkelan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Bagian Keempat**

**Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat**

Uraian Tugas Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Sebagai Berikut:

a) Menyusun bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat, analisis dampak lalu lintas serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas perhubungan darat;

b) Menyusun rencana kerja dan program manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat, analisis dampak lalu lintas serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas perhubungan darat;

c) Mengkoordinasikan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat, analisis dampak lalu lintas serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas perhubungan darat;

d) Menyelenggarakan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat, analisis dampak lalu lintas serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas perhubungan darat;

e) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat, analisis dampak lalu lintas serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas perhubungan darat;

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian Tugas Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas Sebagai Berikut:**

a. Melakukan Kerja sama dengan Instansi dalam rangka menghimpun, Mengolah, Menyajikan, Memelihara, Mengembangkan dan Memanfaatkan Data terkait Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi Darat.

b. Melaksanakan Penelitian, Pengkoordinasian dan Pengembangan Sistem Tranportasi dalam rangka Perkembangan Tranportasi Darat.

c. Merencanakan penysunan program, kegiatan, dan anggaran Seksi Manajemen, Analis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas.

d. Menyiapkan Bahan dan Menyusun rencana kerja seksi manajemen, Analisis Dampak Lalu lintas dan Rekayasa Lalu Lintas.

e. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Perencanaan Jaringan Jalan

f. Menyiapakan Rencana Pengaturan Sirkulasi dan Pengendalian Lalu Lintas pada Jalan, Sungai dan Danau di Wilayah Kabupaten.

g. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

h. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan, Sungai dan Danau di Wilayah Kabupaten.

i. Mengatur tentang kewajiban, Memberikan bantuan kepada perkumpulan atau badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas lainnya.

j. Menyiapkan bahan Rekomendasi batas kecepatan Maksimal, Larangan Pengguna Jalan, dan Dispensasi bagi Jalan tertentu yang berada pada wilayah Kabupaten.

k. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Mengadakan koreksi terhadap kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

l. Membuat laporan Pelaksanaan Tugas sebagai bahan Informasi dan Evaluasi.

m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai bidang tugas dan tanggung jawab

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Adalalin Perhubungan Darat.

o. Melakukan kegiatan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terhadap rencana pembangunan dan Pengembangan Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Insfrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancran lalu lintas dan Angkutan Jalan:

p. Menyusun Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, Pemukiman, dan Insfrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

q. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan forum LLAJ.

r. Melaksanakan kegiatan survei kinerja lalu lintas jalan serta sungai dan danau (pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata).

s. Menyusun usulan rekomendasi penetapan Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Banjar.

t. Melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan media dan alat bantu pengamanan lalu lintas jalan (area traffic control sytem ATCS)

u. Melaksanakan pengkajian dan Manajemen Rekayasa Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

v. Melaksanakan Manajemen dan Pengawasan terhadap parkir dibahu Jalan.

**Uraian Tugas Seksi Keselamatan,Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas**

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan serta sungai dan danau;

b) Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan serta sungai dan danau;

c) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan serta sungai dan danau;

d) Melaksanakan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas angkutan jalan serta sungai dan danau di wilayah kabupaten;

e) Melaksanakan penyidikan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta sungai dan danau, pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan serta laik laut kapal (<7 GT), pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum serta administrasi kendaraan bermotor;

f) Melaksanakan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, pengumpulan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banjar dan usulan rekomendasi penanggulangan;

g) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan serta sungai dan danau untuk kepentingan lalu lintas;

h) Menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan serta sungai dan danau kepada masyarakat, anak sekolah serta pengemudi kendaraan bermotor;

i) Melaksanakan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten Banjar;

j) Melaksanakan pengamanan dan penertiban jalur lalu lintas untuk acara-acara tertentu;

k) Melaksnakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berhubungan dengan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan serta sungai dan danau;

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Bagian Kelima**

**Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat**

Uraian tugas Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat sebagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Angkutan Jalan, Sungai dan Danau;

b. Mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan, Sungai dan Danau;

c. Menyelenggarakan teknis urusan Angkutan Jalan, Sungai dan Danau;

d. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Angkutan Jalan, Sungai dan Danau;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian Tugas Seksi Angkutan Jalan Sebagai Berikut :**

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kerja Angkutan Jalan;

b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Angkutan Jalan;

c. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan jaringan angkutan umum, angkutan pelajar, serta rencana kebutuhan angkutan di wilayah operasional Kabupaten ( seperti pembuatan halte di dekat sekolah );

d. Menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten;

e. Menyiapkan bahan rekomendasi angkutan orang dan barang di jalan, dalam satu wilayah Kabupaten;

f. Menyiapkan bahan penetapan tarif ekonomi untuk penumpang angkutan jalan, di wilayah Kabupaten;

g. Menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan angkutan jalan Perhubungan Darat;

i. Melaksanakan sosialisasi untuk kelancaran Angkutan Jalan ( sosialisasi trayek baru, pembinaan sopir, angkutan pedesaan, dan trayek insidentil angkutan );

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Uraian tugas Seksi Angkutan Sungai dan Danau sebagai berikut :**

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kerja Angkutan Sungai dan Danau;

b. Merencakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Angkutan Sungai dan Danau;

c. Menyiapkan bahan rekomendasi Angkutan Sungai dan Danau dalam satu wilayah Kabupaten;

d. Menyiapkan bahan penetapan tarif ekonomi untuk penumpang Angkutan Sungai dan Danau di wilayah Kabupaten;

e. Menyiapkan penyusunan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten;

f. Pelaksanaan dan pengembangan lokasi pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten;

g. Sosialisasi Angkutan Sungai dan Danau ( seperti : sosialisasi tarif angkutan sungai dan danau, sosialisasi perizinan angkutan sungai dan danau );

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Bagian Keenam**

**Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Sebagai Berikut :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegaitan teknis penunjang.

2. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugasuntuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

3. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**2.2. SUMBER DAYA SKPD**

sumber daya dinas perhubungan kabupaten Banjar terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan /perlengkapan/asset.

1. Sumber daya manusia
2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Klasifikasi Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Sarjana S3 | 0 |
| 2 | Sarjana S2 | 5 |
| 3 | Sarjana S1 | 13 |
| 4 | Diploma DIV | 1 |
| 5 | Diploma DIII | 5 |
| 6 | Diploma DII | 3 |
| 7 | SLTA | 7 |
| 8 | SLTP | 2 |
| 9 | SD | 0 |
|  | Total | 36 |

*Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian*

1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatih penjenjangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pelatihan penjenjangan | Jumlah pegawai |
| 1 | Spamen | 0 |
| 2 | Spama | 1 |
| 3 | Adumla | 0 |
| 4 | Adum | 6 |
|  | Jumlah | 7 |
|  |  |  |

*Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian*

1. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Golongan | Jumlah |
| 1 | IV | 4 |
| 2 | III | 27 |
| 3 | II | 8 |
| 4 | I | 0 |
| 5 | CPNS | 0 |
| 6 | TKK | 71 |
|  | Jumlah | 107 |

*Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian*

1. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Jumlah pegawai |
| 1 | Esselon IIB (Kepala Dinas) | 1 |
| 2 | Esselon III A (Sekretaris) | 1 |
| 3 | Esselon III B (Kepala Bidang) | 3 |
| 4 | Esselon IV A (Kasubag/Kasie/Ka Upt) | 10 |
| 5 | Esselon IV B (Kasubag Tu Upt) | 2 |
| 6 | Staf (termasuk cpns) | 19 |
|  | Jumlah | 36 |

*Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian*

1. Sumber daya lainnya

sumber daya lain nya seperti peralatan,perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak selengkapnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Barang | Banyaknya | Satuan | Kondisi Barang |
| Tanah Terminal Induk Gambut | 1 | Bidang | B |
| Kendaraan Roda Empat | 8 | Unit | B |
| Kendaraan Roda Dua | 16 | Unit | B |
| Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain (Speed Boat) | 1 | Unit | B |
| Mesin Kompresor | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Perkakas Bengkel Service (Perbaikan Bus) | 2 | Buah | B |
| Lain-lain Perkakas Bengkel Khusus (Unit Termoplast/ Mesin Marka) | 1 | Buah | KB |
| Tool Kit Box | 2 | Buah | B |
| Global Position System (GPS) | 4 | Buah | B |
| Mesin Ketik Manual Portable | 7 | Buah | B |
| Band Kas (Brankas) | 2 | Buah | B |
| Filling Besi/ Metal | 20 | Buah | B |
| Rak Besi/ Metal | 9 | Buah | B |
| Lemari Makan | 1 | Buah | B |
| Papan Nama Instansi | 6 | Buah | KB |
| Alat Penghancur Kertas | 3 | Buah | KB |
| Lain-lain Alat Kantor Lainnya (CCTV) | 6 | Buah | B |
| Mesin Absensi (Finger Print) | 6 | Buah | KB |
| Papan Visuil (Papan Parkir) | 26 | Buah | B |
| Meja Kayu (Meja Tamu) | 1 | Buah | B |
| Sofa | 4 | Set | B |
| Meja Kayu (Meja Pelayanan) | 1 | Buah | B |
| Meja Komputer | 3 | Buah | B |
| Lain-lain Meubelair (Gorden) | 3 | Buah | B |
| Meja Kayu (Meja Penerimaan Karcis) | 3 | Buah | B |
| Mesin Penghisap Debu | 1 | Buah | KB |
| Mesin Potong Rumput | 2 | Buah | B |
| AC Split | 24 | Unit | B |
| Lemari Es | 4 | Buah | B |
| Televisi | 13 | Buah | B |
| Sound System Aula | 2 | Buah | B |
| Dispenser | 1 | Buah | B |
| Unit Power Supply (UPS) | 9 | Buah | B |
| Alat Pemadam/ Portable | 6 | Buah | KB |
| P.C. Unit | 40 | Unit | B |
| Note Book | 7 | Buah | B |
| Printer | 38 | Buah | B |
| External (Hard Disk) | 5 | Buah | B |
| Lain-lain Peralatan Personal Komputer (TV Tuner) | 1 | Buah | B |
| External (DVD/ VCD Portable) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Peralatan Jaringan (Kominfo) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Peralatan Jaringan (Wireless Jaringan Internal) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Peralatan Jaringan (Simda) | 1 | Buah | B |
| Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 51 | Buah | B |
| Meja Rapat Pejabat Eselon III | 18 | Buah | B |
| Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 59 | Buah | B |
| Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 33 | Buah | B |
| Audio Filter (Multi Prosessor) | 2 | Buah | B |
| Audio Filter (Equalizer) | 1 | Buah | B |
| Microphone | 13 | Buah | B |
| Set Studio Light Signal (Lighting Studio) | 1 | Buah | B |
| Audio Amplifier (Mixer Audio) | 2 | Buah | B |
| Proyektor + Attachment (LCD Mini) | 2 | Buah | B |
| Camera Electronic (Kamera Digital) | 8 | Buah | B |
| Camera Film (Handycam) | 1 | Buah | B |
| Video Tape Recorder Portable (HDV Video Casette Recorder) | 1 | Buah | B |
| Faximile | 2 | Buah | B |
| Handy Talky | 49 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Sandi (Paku Marka Jalan) | 150 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Sandi (Palang Besi Pembatas Median Jalan) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Sandi (Delineator Besi) | 40 | Buah | B |
| Lain- lain Peralatan Antena VHF/ FM (Antena Arah) | 1 | Buah | B |
| Axle Load Tester (Alat Uji Timbangan Portable) | 2 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik (Alat Uji Lain-lain) | 1 | Buah | B |
| Alat Uji Brake Teseter (2018) | 1 | Set | B |
| Alat Uji Gas Buang (Emisi) | 1 | Buah | B |
| Pistol Gas (Senjata Air Soft Gun) | 3 | Buah | B |
| Bangku Tunggu (Kursi Tunggu Loket) | 3 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Tandon) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Tempat Tandon) | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Bak Sampah Besar Dorong) | 9 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Gerobak + Bak Air Pel Dorong) | 6 | Buah | B |
| Microphone (Table Stand) | 8 | Buah | B |
| Mesin Gerinda Tangan | 2 | Buah | B |
| Mesin Bor Tangan | 2 | Buah | B |
| Peralatan Las Listrik (Mesin Las) | 1 | Buah | B |
| Tangga Aluminium | 1 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Pembersih (Jet Cleaner) | 1 | Buah | KB |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Tandon Air) | 1 | Buah | B |
| Lain-Lain Alat Sandi (Guardrail Water) | 50 | Buah | B |
| Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Pantau/ Jaga Km.7, 2007-2008) | 1 | Unit | B |
| Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Pantau/ Jaga Term. Mtp) | 1 | Unit | B |
| Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen (Garasi Kapal Patroli) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen (Halte) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen (Halte) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Sub Term. Kubah Kelampayan) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Sei.Tabuk Pasar) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Sei.Tabuk Lama/ Keramat) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Pasar Aluh-Aluh Bsr) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Simp. Warga Aluh-Aluh) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen (Dermaga Dpn Ktr Camat Aluh-Aluh) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Pelataran Parkir Sub Terminal) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen (Terminal Induk Km.17 Gambut) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen (Gapura Term. Mtp) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen (Ged.Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 | Unit | B |
| Rambu Bersuar Lalu-lintas Darat (Warning Light) | 7 | Unit | B |
| Rambu Bersuar Lalu-lintas Darat (Warning Light Solar Cell) | 6 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Rambu LLAJ) | 827 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Rambu LLASD) | 123 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (RPPJ) | 44 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Kantor Permanen (Ged. Kantor Dishub) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen (Paving Blok Halaman Term. Mtp) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen (Rehab WC Term. Mtp) | 1 | Unit | B |
| Rambu Bersuar Lalu-lintas Darat (Warning Light Solar Cell) | 4 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Papan Nama Jalan) | 530 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Papan Jurusan Angkot/ Angdes) | 15 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Papan Jurusan AKAP/ AKDP) | 10 | Unit | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Papan Pemberitahuan Jurusan) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Astambul) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Keliling Benteng) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Riam Kanan) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Belangian) | 1 | Unit | B |
| Lain-lain Alat Sandi (Rambu LLAJ-DAK) | 96 | Buah | B |
| Traffic Light (Warning Light Solar Cell) -2 tiang | 2 | Buah | B |
| Traffic Light (Warning Light Solar Cell) -4 tiang | 2 | Buah | B |
| Lain-lain Jalan Kabupaten/ Kota (Lahan Parkir CBS) | 1 | Unit | B |
| Lain-lain Jalan Kabupaten/ Kota (Pagar Pengaman Jalan/ Pulau LL) | 2 | Unit | B |
| Lain-lain Jalan Kabupaten/ Kota (Pulau LL Etalase Kota Tahap III) | 1 | Unit | B |
| Lain-lain Jalan Kabupaten/ Kota (Pagar Pengaman Jalan/ Guard Reil) | 1 | Unit | B |
| Buku Himpunan Peraturan Per UU Bidang perhubungan | 1 | buah | B |
| Dokumen Perencanaan Pembangunan Dermaga | 1 | buah | B |
| Dokumen Studi Kelayakan Sungai Wilayah Teluk Selong | 1 | buah | B |
| Dokumen Penyusunan SID Sungai Wilayah Teluk Selong | 1 | buah | B |
| Dokumen Penyusunan DED Dermaga Teluk Selong | 1 | buah | B |
| Dokumen Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Dermaga Lok Baintan | 1 | buah | B |
| Kumpulan Buku-Buku Perundangan dan Manajemen Pemerintahan | 1 | buah | B |
| Softwere/ Aplikasi | 3 | Buah | B |
| Rig | 1 | Buah | B |
| Lampu Rotary | 1 | Buah | B |
| Mesin tik | 1 | Buah | B |
| Hardisk | 1 | Buah | B |
| Catridge Alat Uji | 1 | Buah | B |
| Jembatan Kec Simp | 1 | Unit | B |
| Marka Jalan & Zebra Cross (2008) | 2 | Unit | B |
| Zoss (2009) | 1 | Unit | B |
| Mesin Hitung | 5 | Buah | B |
| Whiteboard | 3 | Buah | B |
| Flashdisk | 2 | Buah | B |
| Traffic cone | 20 | Buah | B |
| Tabung Pemadam | 1 | Buah | B |
| White board | 2 | Buah | B |
| Keyboard | 4 | Buah | B |
| Flashdisk | 7 | Buah | B |
| Mouse Optik | 2 | Buah | B |
| UPS | 1 | Buah | B |
| Mesin Hitung | 2 | Buah | B |
| Kipas Angin | 2 | Buah | B |
| Senter LLAJ | 20 | Buah | B |
| Helm | 1 | Buah | B |
| Headset | 4 | Buah | B |
| Kontainer Plastik | 2 | Buah | B |
| Mesin Hitung | 4 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Bak Sampah) | 12 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Penerangan Jalan Umum) | 2 | Buah | B |
| Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use (Pompa Air) | 1 | - | B |
| Disel Smoke Taster (Alat Kantor Lainnya) | 1 | - | B |
| Rambu Tidak Bersuar (Warning Light Solar Cell) | 12 | - | B |
| Alat Keamanan Khusus Lainnya (Rompi) | 25 | buah | B |
| Alat Keamanan Khusus Lainnya (Jas Hujan) | 25 | buah | B |
| Traffic cone | 40 | Buah | B |
| Brake Band Taster (Alat Uji Brake Taster) | 1 | Unit | B |
| Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Semi Permanen (Dermaga Sungai di Lok Baintan) | 1 | buah | B |
| Alat Scanner Brother(2018) | 1 | buah | B |
| Alat Gembok Ban Mobil Wheel Clamp (2018) | 6 | Buah | B |
| SIM Pengujian Kendaraan Bermotor CPU (2-18) | 1 | buah | B |

*Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian*

**2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Program Kerja Tahunan yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel : T-C.23



Tabel : T-C.24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke-** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-** | | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)*** | ***(12)*** | ***(13)*** | ***(14)*** | ***(15)*** | ***(16)*** | ***(17)*** | ***(18)*** |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **2.754.289.200,00** | **1.993.660.000,00** | **1.357.632.300,00** | **1.726.856.264,00** | **879.904.894,00** | **2.565.309.032,00** | **1.852.205.770,00** | **1.285.501.340,00** | **1.588.226.128,00** | **855.954.786,00** | **93,14** | **92,90** | **94,69** | **91,97** | **97,28** | **(0,20)** | **(0,09)** |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 190.700.000,00 | 173.700.000,00 | 127.200.000,00 | 179.800.000,00 | 109.630.000,00 | 113.505.190,00 | 106.204.537,00 | 101.754.689,00 | 113.453.771 | 101.030.602,00 | 59,52 | 61,14 | 80,00 | 63,10 | 92,16 | (0,08) | 0,00 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 16.554.000,00 | 16.554.000,00 | 5.649.000,00 | 9.840.000,00 | 3.963.500,00 | 14.055.000,00 | 16.393.400,00 | 5.589.900,00 | 9.800.000 | 3.946.000,00 | 84,90 | 99,03 | 98,95 | 99,59 | 99,56 | (0,13) | 0,07 |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 38.250.000,00 | 33.250.000,00 | 45.600.000,00 | 29.600.000,00 | 25.350.000,00 | 18.500.000,00 | 33.250.000,00 | 45.575.000,00 | 29.218.000 | 25.350.000,00 | 48,37 | 100,00 | 99,95 | 98,71 | 100,00 | (0,06) | 0,20 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 31.234.000,00 | 31.234.000,00 | 22.007.100,00 | 26.061.000,00 | 26.801.000,00 | 29.734.000,00 | 29.734.000,00 | 21.507.100,00 | 24.636.000 | 22.643.500,00 | 95,20 | 95,20 | 97,73 | 94,53 | 84,49 | (0,02) | (0,03) |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.450.000,00 | 32.450.000,00 | 31.162.200,00 | 36.480.000,00 | 27.395.000,00 | 28.530.000,00 | 29.557.200,00 | 25.580.600,00 | 27.542.600 | 27.041.700,00 | 87,92 | 91,09 | 82,09 | 75,50 | 98,71 | (0,03) | (0,01) |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.910.000,00 | 7.910.000,00 | 4.124.000,00 | 4.203.000,00 | 2.193.000,00 | 6.937.500,00 | 7.853.500,00 | 4.094.000,00 | 4.203.000 | 2.193.000,00 | 87,71 | 99,29 | 99,27 | 100,00 | 100,00 | (0,23) | (0,08) |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 323.740.000,00 | 292.972.000,00 | 171.035.000,00 | 180.635.000,00 | 13.500.000,00 | 284.100.000,00 | 261.886.000,00 | 151.635.000,00 | 157.805.000 | 12.432.000,00 | 87,76 | 89,39 | 88,66 | 87,36 | 92,09 | (0,35) | (0,11) |
| Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 466.651.200,00 | 480.000.000,00 | 413.705.000,00 | 543.000.000,00 | 107.096.570,00 | 466.197.342,00 | 479.577.133,00 | 404.815.051,00 | 536.004.726 | 107.044.945,00 | 99,90 | 99,91 | 97,85 | 98,71 | 99,95 | (0,15) | 0,05 |
| Penyedia Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | 1.646.800.000,00 | 925.590.000,00 | 537.150.000,00 | 717.237.264,00 | 563.975.824,00 | 1.603.750.000,00 | 887.750.000,00 | 524.950.000,00 | 685.563.031 | 554.273.039,00 | 97,39 | 95,91 | 97,73 | 95,58 | 98,28 | (0,18) | (0,14) |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **1.717.527.400,00** | **313.158.826,00** | **365.954.200,00** | **397.339.000,00** | **379.281.000,00** | **1.246.258.796,00** | **303.575.450,00** | **338.710.455,00** | **378.101.600,00** | **365.135.070,00** | **72,56** | **96,94** | **92,56** |  | **96,27** | **(0,15)** | **(0,13)** |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 370.098.000,00 | 21.000.000,00 | 56.109.000,00 | 101.010.000,00 | 139.275.000,00 | 367.296,00 | 20.909.800,00 | 53.353.455,00 | **97.315.500,00** | 139.048.370,00 | **0,10** | **99,57** | **95,09** | **96,34** | 99,84 | **0,48** | **14,58** |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | **-** | - | - | 73.350.000,00 | - | - | - | - | 71.850.000 | - | **-** | **-** | **-** |  | - | - | - |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | - | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | 19.966.400,00 | 14.915.000 | 23.999.600,00 | **-** | **-** | **99,83** | **99,43** | 100,00 | 0,09 | (0,06) |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 57.468.100,00 | 51.179.700,00 | 57.468.100,00 | 43.495.000,00 | 37.501.000,00 | 41.750.000,00 | 49.936.700,00 | 56.199.000,00 | 42.179.000 | 34.963.800,00 | **72,65** | **97,57** | **97,79** | **96,97** | 93,23 | (0,77) | 0,02 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 260.107.100,00 | 240.979.126,00 | 232.377.100,00 | 164.484.000,00 | 178.505.000,00 | 175.495.500,00 | 232.728.950,00 | 209.191.600,00 | 151.842.100 | 167.123.300,00 | **67,47** | **96,58** | **90,02** | **92,31** | 93,62 | (0,02) | (0,01) |
| Pembangunan Gedung Kantor | 1.029.854.200,00 | - | - | - | - | 1.028.646.000,00 | - | - | - | - | **99,88** | **-** | **-** |  | - | - | - |
| **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **-** | **-** | **-** | **15.600.000** | **-** |  | **-** |  | **15.600.000** |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | - | - | 15.600.000 | - |  | - |  | 15.600.000 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **273.400.000,00** | **204.612.600,00** | **157.000.000,00** | **175.818.000** | **45.863.430,00** | **240.699.100,00** | **191.819.350,00** | **129.897.000,00** | **149.367.757** | **45.863.430,00** | **88,04** | **93,75** |  |  | **100,00** | **-0,21** | **(0,09)** |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 273.400.000,00 | 204.612.600,00 | 157.000.000,00 | 175.818.000 | 45.863.430,00 | 240.699.100,00 | 191.819.350,00 | 129.897.000,00 | 149.367.757 | 45.863.430,00 | 88,04 | 93,75 | 82,74 | **84,96** | 100,00 | 2,56 | 0,04 |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **174.855.000,00** | **132.212.564,00** | **64.050.000,00** | **91.127.500** | **67.643.000,00** | **140.955.000,00** | **130.696.200,00** | **61.374.500,00** | **90.286.300** | **60.603.600,00** | **80,61** | **98,85** | **95,82** | **99,08** | **89,59** | **0,49** | **(0,03)** |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 40.000.000,00 | 28.587.564,00 | 44.750.000,00 | - | - | 39.494.800,00 | 28.480.200,00 | 42.136.500,00 |  | - | 98,74 | 99,62 | 94,16 |  | - | (0,06) | (0,20) |
| Penyusunan Laporan Akhir Tahun | 134.855.000,00 | 103.625.000,00 | 19.300.000,00 | 31.427.500,00 | 21.025.000,00 | 101.460.200,00 | 102.216.000,00 | 19.238.000,00 | 30.824.700 | 20.741.500,00 | 75,24 | 98,64 | 99,68 | 98,08 | 98,65 | - | 0,15 |
| Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan | - | - | - | 13.290.000,00 | 6.723.000,00 | - | - | - | 13.222.900 | 6.591.700,00 | - | - | - | 99,50 | 98,05 | - | - |
| Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD | - | - | - | 22.290.000,00 | 13.132.000,00 | - | - | - | 22.289.100 | 11.376.700,00 | - | - | - | 100,00 | 86,63 | - | - |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | - | - | - | 9.825.000,00 | 6.342.000,00 | - | - | - | 9.654.600 | 4.538.700,00 | - | - | - | 98,27 | 71,57 | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | - | - | - | 14.295.000,00 | 20.421.000,00 | - | - | - | 14.295.000 | 17.355.000,00 | - | - | - | 100,00 | 84,99 | - | - |
| **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **1.852.849.800,00** | **918.689.700,00** | **908.138.600,00** | **-** | **-** | **1.684.174.608,00** | **847.048.837,00** | **887.766.300,00** | **-** | **-** | **90,90** | **92,20** | **97,76** |  | **-** | **#VALUE!** | **(0,36)** |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | - | 175.399.700,00 | 123.218.500,00 | - | - | - | 172.869.127,00 | 119.072.200,00 | - | - | - | 98,56 | 96,64 |  | - | (0,05) | (0,33) |
| Penyusunan Kebijakan,Norma,Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | - | - | 177.382.100,00 | - | - | - | - | 176.740.100,00 | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | - | 74.757.000,00 | - | - | - | - | 70.795.850,00 | - | - | - | - | 94,70 | - |  | - | - | - |
| Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | 157.650.000,00 | 164.800.000,00 | 132.560.000,00 | - | - | 125.637.600,00 | 146.220.860,00 | 122.032.000,00 | - | - | 79,69 | 88,73 | 92,06 |  | - | (0,18) | (0,25) |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 335.979.000,00 | 206.572.000,00 | 116.192.000,00 | - | - | 299.450.830,00 | 204.936.500,00 | 115.719.500,00 | - | - | 89,13 | 99,21 | 99,59 |  | - | #VALUE! | (0,44) |
| Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 285.525.200,00 | 69.475.200,00 | 42.000.000,00 | - | - | 211.445.200,00 | 62.420.100,00 | 39.429.100,00 | - | - | 74,05 | 89,85 | 93,88 |  | - | - | (0,34) |
| Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat | 1.073.695.600,00 | 227.685.800,00 | 316.786.000,00 | - | - | 1.047.640.978,00 | 189.806.400,00 | 314.773.400,00 | - | - | 97,57 | 83,36 | 99,36 |  | - | - | (0,09) |
| **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** | **672.344.600,00** | **518.710.100,00** | **939.862.900,00** | **313.930.000** | **94.272.000,00** | **640.451.700,00** | **633.644.630,00** | **925.935.150,00** | **304.321.113** | **87.340.400,00** | **95,26** | **122,16** | **98,52** |  | **92,65** | **(0,14)** | **(0,06)** |
| Kegiatan penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang | **-** | 132.200.000,00 | - | - | - | **-** | 121.600.700,00 | **-** |  | - | - | 91,98 | - |  | - | - | - |
| Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/awak Kendaraan Angkutan umum Teladan | 85.851.900,00 | 34.873.900,00 | 56.591.500,00 | 45.310.000,00 | - | 72.527.400,00 | 34.833.900,00 | 51.921.100,00 | 41.819.813,00 | **-** | 84,48 | 99,89 | 91,75 |  | - | **-** | **-** |
| Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya | 505.146.900,00 | 279.670.400,00 | - | - | - | 497.971.000,00 | 279.317.400,00 | - | - | - | 98,58 | 99,87 | - |  | - | 0,61 | (0,11) |
| Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah | 81.345.800,00 | 91.345.800,00 | 99.610.000,00 | - | - | 69.953.300,00 | 89.470.600,00 | 96.306.900,00 | - | - | 85,99 | 97,95 | 96,68 |  | - | - | - |
| Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | - | 66.690.000,00 | 89.493.000,00 | - | - | - | 64.526.030,00 | 84.793.000,00 | - | - | - | 96,76 | 94,75 |  | - | - | - |
| Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan | - | 46.130.000,00 | 663.668.400,00 | - | - | - | 43.896.000,00 | 663.051.900,00 | - | - | - | 95,16 | 99,91 |  | - | - | - |
| Perencanaan Transportasi | - | - | - | 73.000.000 | 40.250.000,00 | - | - | - | 72.850.000 | 38.740.400,00 | - | - | - |  | 96,25 | - | - |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan | - | - | - | 94.300.000 | - | - | - | - | 89.064.500 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan | - | - | - | 83.100.000 | 54.022.000,00 | - | - | - | 82.400.000 | 48.600.000,00 | - | - | - |  | 89,96 | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | - | - | 30.500.000,00 | 18.220.000 | - | - | - | 29.862.250,00 | 18.186.800 | - |  |  | 97,91 |  | - | #VALUE! | (0,10) |
| **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas** | **1.152.262.000,00** | **711.726.400,00** | **721.811.000,00** | **-** | **-** | **1.138.984.400,00** | **708.372.000,00** | **713.361.000,00** | **-** | **-** | **98,85** | **99,53** | **98,83** | **-** | **-** | **0,05** | **(0,34)** |
| Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas | 600.951.500,00 | 279.800.000,00 | 315.811.000,00 | - | - | 590.648.800,00 | 278.625.600,00 | 308.240.000,00 | - | - | 98,29 | 99,58 | 97,60 | - | - | 0,42 | (0,36) |
| Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas (DAK) | 109.980.000,00 | - |  | - | - | 109.480.800,00 | - | - | - | - | 99,55 | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Marka Jalan | 441.330.500,00 | 431.926.400,00 | 383.000.000,00 | - | - | 438.854.800,00 | 429.746.400,00 | 382.199.000,00 | - | - | 99,44 | 99,50 | 99,79 | - | - | (0,03) | (0,28) |
| Pengadaan Pagar Pengaman Jalan | - | - | 23.000.000,00 | - | - | - | - | 22.922.000,00 | - | - | - | - | 99,66 | - | - | - | - |
| **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor** | **Rp383.034.000** | **769.510.263,00** | **979.988.000,00** | **2.318.621.600,00** | **459.972.105,00** | **360.259.080,00** | **752.252.676,00** | **959.126.025,00** | **2.309.959.212,00** | **453.229.484,00** | **94,05** | **97,76** | **97,87** |  | **98,53** | **0,21** | **0,69** |
| Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor | 383.034.000,00 | 462.748.041,00 | 445.438.000,00 | - | - | 360.259.080,00 | 457.130.000,00 | 427.149.800,00 | - | - | **94,05** | **98,79** | **95,89** |  | - | (0,01) | (0,20) |
| Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | **-** | 306.762.222,00 | 534.550.000,00 | 1.292.151.600,00 | - | - | 295.122.676,00 | 531.976.225,00 | 1.289.962.100,00 | - | **-** | **96,21** | **99,52** |  | - | - | - |
| Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | **-** | - | - | 432.160.000,00 | 366.572.105,00 |  |  |  | 427.551.912,00 | 360.113.484,00 | **-** | **-** | **-** |  | 98,24 | - | - |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | **-** | - | - | 584.600.000,00 | 93.400.000,00 |  |  |  | 583.667.500,00 | 93.116.000,00 |  |  |  |  | 99,70 | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | **-** | - | - | 9.710.000,00 | - |  |  |  | 8.777.700,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| **Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan** |  |  |  | **243.500.000,00** | **156.514.000,00** |  |  |  | **239.500.681,00** | **151.595.300,00** |  |  |  |  | **96,86** | **-** | **-** |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | **-** | **-** | **-** | 42.000.000,00 | 44.375.000,00 |  |  |  | 41.600.000,00 | 43.085.500,00 |  |  |  |  | 97,09 | - | - |
| Pembangunan Halte | **-** | **-** | **-** | 71.500.000,00 | 1.819.000,00 |  |  |  | 71.464.000,00 | 1.740.000,00 |  |  |  |  | 95,66 | - | - |
| Pemeliharaan Halte | **-** | **-** | **-** | 12.450.000,00 | 19.125.000,00 |  |  |  | 12.380.000,00 | 19.116.500,00 |  |  |  |  | 99,96 | - | - |
| Pemeliharaan Dermaga | **-** | **-** | **-** | 50.200.000,00 | 33.625.000,00 |  |  |  | 50.108.681,00 | 33.483.300,00 |  |  |  |  | 99,58 | - | - |
| Pembinaan Perbengkelan | **-** | **-** | **-** | 61.450.000,00 | 57.570.000,00 |  |  |  | 58.078.000,00 | 54.170.000,00 |  |  |  |  | 94,09 | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | **-** | - | - | 5.900.000,00 | - |  |  |  | 5.870.000,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| **Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan** | **-** | **-** | **-** | **322.605.000,00** | **221.748.000,00** |  |  |  | **303.223.800,00** | **218.686.200,00** |  |  |  |  | **98,62** | **-** | **-** |
| Kegiatan Operasional Terminal | **-** | **-** | **-** | 278.735.000,00 | 207.500.000,00 |  |  |  | 266.134.000,00 | 205.811.200,00 |  |  |  |  | 99,19 | - | - |
| Kegiatan Operasional Dermaga |  | **-** | **-** | 4.450.000,00 | 4.128.000,00 |  |  |  | 3.380.000,00 | 3.450.000,00 |  |  |  |  | 83,58 | - | - |
| Kegiatan Pengelolaan Perparkiran |  | **-** | **-** | 28.000.000,00 | 10.120.000,00 |  |  |  | 22.750.000,00 | 9.425.000,00 |  |  |  |  | 93,13 | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | **-** | **-** | **-** | 11.420.000,00 | - |  |  |  | 10.959.800,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| **Program Pembinaan keselamatan Berlalu Lintas** | **-** | **-** | **-** | **678.910.000,00** | **307.160.000,00** |  |  |  | **661.149.300,00** | **307.095.000,00** |  |  |  |  | **99,98** | **-** | **-** |
| Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | **-** | **-** | **-** | 45.960.000,00 | 1.560.000,00 |  |  |  | 45.549.300,00 | 1.560.000,00 |  |  |  |  | 100,00 | - | - |
| Pelatihan Dasar Perhubungan Darat | **-** | **-** | **-** | 88.800.000,00 | - |  |  |  | 84.110.000,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | **-** | **-** | **-** | 33.500.000,00 | - |  |  |  | 23.920.000,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | **-** | **-** | **-** | 400.100.000,00 | 297.055.000,00 |  |  |  | 399.120.000,00 | 297.035.000,00 |  |  |  |  | 99,99 | - | - |
| Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan | **-** | **-** | **-** | 86.100.000,00 | 8.545.000,00 |  |  |  | 86.000.000,00 | 8.500.000,00 |  |  |  |  | 99,47 | - | - |
| Forum LLAJ | **-** | **-** | **-** | 24.450.000,00 | - |  |  |  | 22.450.000,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| **Program pembangunan dan pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat** | **-** | **-** | **-** | **964.900.000,00** | **733.856.000,00** |  |  |  | **959.499.300,00** | **727.461.300,00** |  |  |  |  | **99,13** | **-** | **-** |
| Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas | **-** | **-** | **-** | 63.300.000,00 | - |  |  |  | 62.417.000,00 | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas | **-** | **-** | **-** | 181.800.000,00 | 27.724.000,00 |  |  |  | 181.145.600,00 | 27.559.000,00 |  |  |  |  | 99,40 | - | - |
| Pengadaan Marka Jalan | **-** | **-** | **-** | 395.300.000,00 | 354.726.600,00 |  |  |  | 393.805.600,00 | 353.847.100,00 |  |  |  |  | 99,75 | - | - |
| Pengadaan Pagar Pengaman Jalan | **-** | **-** | **-** | 99.300.000,00 | 26.560.500,00 |  |  |  | 98.809.600,00 | 26.420.500,00 |  |  |  |  | 99,47 | - | - |
| Pengadaan APILL | **-** | **-** | **-** | 83.300.000,00 | 149.800.000,00 |  |  |  | 83.150.600,00 | 149.718.000,00 |  |  |  |  | 99,95 | - | - |
| Pemeliharaan APILL | **-** | **-** | **-** | 57.000.000,00 | 27.000.000,00 |  |  |  | 56.950.000,00 | 27.000.000,00 |  |  |  |  | 100,00 | - | - |
| Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | **-** | **-** | **-** | 27.400.000,00 | 142.091.000,00 |  |  |  | 25.932.400,00 | 137.009.600,00 |  |  |  |  | 96,42 | - | - |
| Penyusunan Kebijakan,Norma,Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | **-** | **-** | **-** | 51.400.000,00 | 5.953.900,00 |  |  |  | 51.398.500,00 | 5.907.100,00 |  |  |  |  | 99,21 |  | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | **-** | **-** | **-** | 6.100.000,00 | - |  |  |  | 5.890.000,00 | - |  |  |  |  | - |  | - |

* 1. **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

**A. Bidang Perhubungan**

Permasalahan dan tantangan di bidang Perhubungan meliputi permasalahan dan tantangan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan , Sungai dan Danau.

* 1. **Angkutan Jalan**

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut ini :

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan.
2. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan;
3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.
4. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.
5. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, beberapa tahun ke belakang terjadi penurunan ijin trayek angkutan umum.
6. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat disiplin pengguna jalan, kurangnya kualitas dan kuantitas rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.
7. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat :
8. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
9. Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
10. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
11. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
12. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
13. Belum mantapnya tatanan transportasi wilayah dan lokal;
14. Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah dibidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
15. Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalulintas dijalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran batas muatan, perlengkapan kendaraan, kelengkapan surat, dan pelanggaran rambu jalan. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas;
16. Masih terbatasnya pengembangan SDM dibidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
17. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat tundaan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan.
18. Rendahnya kualitas angkutan umum akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator angkutan umum, , serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
    1. **Angkutan Sungai Dan Danau**
19. Menurunnya tingkat penggunaan lalu lintas angkutan sungai dan danau di wilayah Kabupaten Banjar.
20. Kualitas dan jumlah prasarana dan sarana LLASD masih cukup rendah.
21. Pemanfaatan sungai, kanal dan danau untuk kebutuhan transportasi rakyat/lokal/kota masih rendah serta kurangnya pemanfaatan potensi untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah. Kelembagaan, peraturan serta SDM dan pendanaan dalam sistem pelestarian dan pemeliharaan alur transportasi sungai dan kanal yang perlu dikoordinasikan dengan penanganan masalah lingkungan, pengembangan pariwisata, budaya masyarakat dan tata ruang wilayah.
22. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi Sungai dan Danau dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana Angkutan Sungai dan Danau dalam era otonomi.
23. Terbatasnya jangkauan Angkutan SDP dalam melayani kebutuhan angkutan.

**BAB 3**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. **identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkut paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi-pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

* + - 1. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai.
      2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah kondisi angkutan perkotaan/perdesaan yang kurang layak dan perlunya penataan ulang jaringan trayek sesuai dengan sebaran penduduk dan pola pergerakan penduduk.
      3. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, dikarenakan semakin mudahnya untuk memiliki kendaraan dan angkutan umum dinilai kurang nyaman dan layak.
      4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh.
      5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
      6. Penataan parkir masih belum maksimal, masih terdapat parkir di bahu jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan, hal ini diantaranya disebabkan karena pihak toko atau penjual tidak menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga pembeli memarkir di bahu jalan yang memakan sebagian badan jalan.
      7. Fasilitas perlengkapan jalan yang layak masih belum memadai diantaranya karena adanya aksi pencurian atau pengrusakan.
      8. Belum diperbaharuinya dokumen perencanaan transportasi secara menyeluruh.

Perubahan berbagai paradigma tersebut di atas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Pada skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma di atas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah:

* + - 1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
      2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi.
      3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
      4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
      5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
         1. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
         2. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara transportasi serta pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
         3. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
         4. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|
| Tingkat kecelakaan lalu lintas | Rasio kecelakaan per jumlah keberangkatan di Kabupaten Banjar sebesar 0,00506 | 1. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) jumlahnya masih belum mencukupi dan fasilitas yang ada mengalami rusak atau hilang; 2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan; 3. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnnya penanganan serta penertiban parkir liar (Hambatan samping sedang (PKL, on-street parking, angkot). |
| Belum optimalnya pelayanan angkutan darat dan sungai | Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai | 1. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte, dermaga) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi; 2. Kondisi angkutan umum yang dinilai kurang nyaman 3. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal; |

* 1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banjar dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan Program/ Kegiatan Prioritas.

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang terkait dengan pencapaian Misi 2 yaitu : *“****Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*** *”*. Tujuan yang akan dicapai adalah Tujuan 2.1 yaitu : “Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas”. Sasaran yang akan dicapai adalah sasaran 2.1.1 “ Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi”.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. RPJMD tahun 2021-2026 ini berusaha diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan strategis guna mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis dalam penyelesaian yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada Tahun 2022.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

|  |
| --- |
| Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD |
|
| VISI :  TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS |
| MISI 2  *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*; |
| Tujuan 2.1  Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas |
| Sasaran 2.1.1  Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi |
| Strategi 2.1.1  Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan |
| Kode 2.15.02  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Indikator kinerja : V/C Ratio |

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Banjar diantaranya :

* + - 1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
      2. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemerawutan di jalan.
      3. Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun trafic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyaman di jalan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Banjar yaitu :

* + - 1. Meningkatkan Keselamatan berlalu lintas dengan cara melakukan pengawasan dan pengujian terhadap kendaraan laik jalan.
      2. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
      3. Pengembangan transportasi darat dan sungai yang menghubungkan wilayah terpencil.
  1. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**
     1. **Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

Program Infrastruktur Konektivitas

SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

* + 1. **Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**

Visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dimana sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2021 adanya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penyelarasan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Berkelanjutan Dan Berintegrasi Di Kalimantan Selatan Yang Aman, Nyaman dan Terjangkau”. Untuk pencapaian visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

Mewujudkan Penyelenggaraan Transportasi Yang Efektif Dan Efisien Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Mewujudkan Fasilitas Keselamatan Bidang Perhubungan Yang Merata Guna Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam tiga aspek yaitu (1) keselamatan dan kenyamanan, (2) pelayanan transportasi dan (3) kapasitas transportasi. Hal tersebut selaras dengan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan propinsi

Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum

Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
     1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

* + - 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
      2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
      3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

* + - 1. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
      2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
      3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
      4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
      6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
      7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
      8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
      9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
    1. **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

* + - 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
      2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
      3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
      4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
      5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
      6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) merupakan salah satu produk perencanaan tata ruang di tingkat nasional. RTR KSN memiliki urgensi untuk direncanakan mengingat Indonesia memiliki banyak wilayah strategis baik dari kepentingan ekonomi maupun sosial budaya. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut (Banjarbakula). Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan melalui PP 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu disusun rencana tata ruangnya. Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan akan menjadi kota metropolitan dalam 20 tahun kedepan, sehingga rencana tata ruangnya memerlukan pengaturan lebih lanjut agar kabupaten dan kota di sekitarnya termasuk dalam hal ini Kabupaten Banjar dapat mendukung dan menopang perkembangan kota Banjarmasin. Potensi ekonomi yang dimiliki Kawasan Banjarbakula dapat dimanfaatkan sebagai pendukung perkembangan kota, antara lain potensi ekspor industri, dan kawasan lumbung pangan nasional. Pengembangan perkotaan di Banjarbakula diharapkan dapat menerapkan konsep keseimbangan dan keteradilan agar tidak terjadi ketimpangan, karena ketimpangan ini adalah penyebab kotakota di sekitarnya tidak bisa membangun daerahnya sendiri.

* 1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan.

Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan sistem tata kota, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda tranportasi, perencanaan dan pengembangan yang perlu ditata dalam suatu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya.

Pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan pada indikator kinerja utama antara lain pada indikator persentase pelayanan angkutan yang baik dan indikator persentase titik kemacetan yang teratasi walaupun sudah tercapai sesuai dengan target dengan capaian rasio sebesar 100% namun seiring perkembangan kota dan pembangunan proyek nasional serta tingkat jaringan jalan (LOS) yang masih rendah maka kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan.

Sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam meningkatkan pelayanan transportasi yaitu :

* + - 1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional
      2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
      3. Meningkatnya Keselamaatan Transportasi

Adapun sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Terwujudnya Konektivitas Provinsi

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
2. Meningkatkan keselamatan Transportasi

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Banjar. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, maka isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut :

* + - 1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
      2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
      3. Belum belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisi dampak lalu lintas/andalalin dan pengelolaan parkir;
      4. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian
      5. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan;
      6. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnnya penanganan serta penertiban parkir liar (Hambatan samping sedang (PKL, on-street parking, angkot).
      7. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte, dermaga) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
      8. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum ;

**BAB 4**

**TUJUAN dan SASARAN**

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kab Banjar adalah :

* + - 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar.
      2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan Indikator Sasaran Persentase Penurunan Kecelakaan Transportasi.
      3. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel T.C.25 seperti dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/Sasaran** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke** | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Rasio Konektivitas | 62.50 | 72.50 | 78,33 | 84,17 | 90,00 | 90,00 |

**BAB 5**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat keseluruhan kebijakan publik dilingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan.

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Selain penekanan pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi secara berkelanjutan pada aspek keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Ketiga aspek diatas akan menjadi perhatian penting pada rencana kerja Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan kelancaran proses distribusi orang dan barang

Untuk strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan | Meningkatkan sarana transportasi jalan yang layak |
| Melengkapi prasarana jalan sesuai dengan kebutuhan |
| Meningkatkan keselamatan transportasi | Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas |
| Meningkatkan keterpenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan | Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sungai dan danau yang layak |

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kab Banjar sesuai dengan Visi RPJMD 2021-2026 yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”.***

Dinas Perhubungan Kab. Banjar juga mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu ***“Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan”***

**BAB 6**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dapat dilihat sesuai tabel 6.1. di bawah ini.

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Program/Kegiatan Perhubungan** | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)** | | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD** | | | **Unit Kerja Parangakat Daerah Penanggung Jawab** | **Lokasi** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |  |
| **Target** | **satuan** | **Rp.** | **Target** | **satuan** | **Rp.** | **Target** | **satuan** | **Rp.** | **Target** | **satuan** | **Rp.** | **Target** | **satuan** | **Rp.** | **Target** | **satuan** | **Rp.** |  |
| ***1*** | ***2*** |  | ***4*** | ***5*** |  | ***6*** |  |  | ***7*** |  | ***8*** |  |  |  |  |  |  | ***9*** |  | ***10*** | ***11*** |  |  | ***12*** | ***13*** |  |
| **Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi** |  |  | **Indeks Konektivitas** |  |  | **68,28** |  |  | **72,7** |  |  | **75,46** |  |  | **78,21** |  |  | **80,96** |  |  | **80,96** |  |  | **Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan** | **Kab. Banjar** |  |
|  | **Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi** |  | **Rasio Konektivitas** | **56,67** | **Rasio** | **62,50** | **Rasio** | **Rp8.832.023.745** | **72,50** | **Rasio** | **Rp9.185.304.695** | **78,33** | **Rasio** | **Rp9.501.716.883** | **84,17** | **Rasio** | **Rp9.958.931.558** | **90,00** | **Rasio** | **Rp10.274.429.628** | **90,00** | **Rasio** | **Rp47.752.406.508** | **Dishub** | **Kab. Banjar** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Rp1.819.314.800** |  |  | **Rp1.892.087.392** |  |  | **Rp1.916.770.888** |  |  | **Rp2.070.587.723** |  |  | **Rp2.070.552.040** |  |  | **Rp9.769.312.843** |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar** |  |  | **66,57** | **persen** | **Rp1.034.809.600** | **70,21** | **persen** | **Rp1.120.872.392** | **72,45** | **persen** | **Rp1.065.355.888** | **75,16** | **persen** | **Rp1.188.119.723** | **77,86** | **persen** | **Rp1.188.084.040** | **77,86** | **persen** | **Rp5.597.241.643** | **kabid Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat** | **Kab. Banjar** |  |
|  |  | **Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ 1.1)** | ***Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)*** |  |  | **70,08** | **persen** | **Rp702.528.700** | **70,11** | **persen** | **Rp708.528.700** | **70,15** | **persen** | **Rp572.566.720** | **70,19** | **persen** | **Rp666.870.108** | **70,23** | **persen** | **Rp687.410.513** | **70,22500** | **persen** | **Rp3.337.904.741** | **Dishub** |  |  |
|  |  | **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik** | **12,50%** | **persen** | **25,00%** | **persen** | **Rp140.800.000** | **37,50%** | **persen** | **Rp140.800.000** | **50,00%** | **persen** | **Rp170.800.000** | **62,50%** | **persen** | **Rp170.800.000** | **75,00%** | **persen** | **Rp170.800.000** | **75,00%** | **persen** | **Rp794.000.000** | **seksi Angkutan Jalan** |  |  |
|  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 | Laporan | 12,00 | Laporan | Rp118.330.000 | 12,00 | Laporan | Rp118.330.000 | 12,00 | Laporan | Rp148.330.000 | 12,00 | Laporan | Rp148.330.000 | 12,00 | Laporan | Rp148.330.000 | 60,00 | Laporan | **Rp681.650.000** | seksi Angkutan Jalan | Kab. Banjar |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | n/a | Laporan | 1,00 | Laporan | Rp22.470.000 | 1,00 | Laporan | Rp22.470.000 | 1,00 | Laporan | Rp22.470.000 | 1,00 | Laporan | Rp22.470.000 | 1,00 | Laporan | Rp22.470.000 | 5,00 | Laporan | **Rp112.350.000** | seksi Angkutan Jalan | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Umum** | **0** | **persen** | **0,00%** | **persen** | **Rp0** | **100%** | **persen** | **Rp6.000.000** | **100%** | **persen** | **Rp24.000.000** | **100%** | **persen** | **Rp26.000.000** | **100%** | **persen** | **Rp31.000.000** | 100% | **persen** | **Rp87.000.000** | **seksi Angkutan Jalan** | Kab. Banjar |  |
|  |  | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | Dokumen |  | Dokumen | Rp0 | 1,00 | Dokumen | Rp3.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp18.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp20.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp25.000.000 | 4,00 | Dokumen | **Rp66.000.000** | seksi Angkutan Jalan | Kab. Banjar |  |
|  |  | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | Laporan |  | Laporan | Rp0 | 1,00 | Laporan | Rp3.000.000 | 1,00 | Laporan | Rp6.000.000 | 1,00 | Laporan | Rp6.000.000 | 1,00 | Laporan | Rp6.000.000 | 4,00 | Laporan | **Rp21.000.000** | seksi Angkutan Jalan | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan** | **100%** | **persen** | **100%** | **persen** | **Rp561.728.700** | **100%** | **persen** | **Rp561.728.700** | **100%** | **persen** | **Rp561.728.700** | **100%** | **persen** | **Rp661.728.700** | **100%** | **persen** | **Rp631.728.700** | 100% | **persen** | **Rp2.978.643.500** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 9,00 | Unit | 0,00 | Unit | Rp0 | 0,00 | Unit | Rp0 | 0,00 | Unit | Rp0 | 1,00 | Unit | Rp50.000.000 | 1,00 | Unit | Rp50.000.000 | 2,00 | persen | **Rp100.000.000** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 5587 | Unit | 5700,00 | Unit | Rp322.308.400 | 5850,00 | Unit | Rp322.308.400 | 5950,00 | Unit | Rp322.308.400 | 6050,00 | Unit | Rp322.308.400 | 6150,00 | Unit | Rp322.308.400 | 29700,00 | Dokumen | **Rp1.611.542.000** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4000 | Dokumen | 4000,00 | Dokumen | Rp100.000.000 | 4000,00 | Dokumen | Rp100.000.000 | 4000,00 | Dokumen | Rp100.000.000 | 4000,00 | Dokumen | Rp150.000.000 | 4000,00 | Dokumen | Rp120.000.000 | 20000,00 | Buah | **Rp570.000.000** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 | Laporan | 1,00 | Laporan | Rp69.060.300 | 1,00 | Laporan | Rp69.060.300 | 1,00 | Laporan | Rp69.060.300 | 1,00 | Laporan | Rp69.060.300 | 1,00 | Laporan | Rp69.060.300 | 5,00 | Buah | **Rp345.301.500** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 | Unit | 9,00 | Unit | Rp70.360.000 | 9,00 | Unit | Rp70.360.000 | 9,00 | Unit | Rp70.360.000 | 9,00 | Unit | Rp70.360.000 | 9,00 | Unit | Rp70.360.000 | 45,00 | Buah | **Rp351.800.000** | UPT PKB | Kab. Banjar |  |
|  |  | **LLAJ 1.2** | ***Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi*** | **n/a** | **n/a** | **63%** | **persen** | **Rp332.280.900** | **70%** | **persen** | **Rp412.343.692** | **75%** | **persen** | **Rp492.789.168** | **80%** | **persen** | **Rp521.249.615** | **86%** | **persen** | **Rp500.673.527** | **86%** | **persen** | **Rp2.259.336.902** |  | **Kab. Banjar** |  |
|  |  | **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar** | **53,13%** | **persen** | **55%** | **persen** | **Rp248.280.900** | **59%** | **persen** | **Rp258.840.736** | **63%** | **persen** | **Rp266.476.800** | **68,75%** | **persen** | **Rp274.906.568** | **75%** | **persen** | **Rp288.673.527** | 75% | **persen** | **Rp1.337.178.531** | UPT Terminal | Kab. Banjar |  |
|  |  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 1 | Unit | 1,00 | Unit | Rp198.180.900 | 1,00 | Unit | Rp206.108.136 | 1,00 | Unit | Rp210.744.200 | 1,00 | Unit | Rp219.173.968 | 1,00 | Unit | Rp227.940.927 | 1,00 | Unit | **Rp1.062.148.131** | UPT Terminal | Kab. Banjar |  |
|  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 | Unit | 3,00 | Unit | Rp50.100.000 | 5,00 | Unit | Rp52.732.600 | 3,00 | Unit | Rp55.732.600 | 4,00 | Unit | Rp55.732.600 | 4,00 | Unit | Rp60.732.600 | 19,00 | Unit | **Rp275.030.400** | UPT Terminal | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi** | **65%** | **persen** | **70%** | **persen** | **Rp84.000.000** | **75%** | **persen** | **Rp153.502.956** | **80%** | **persen** | **Rp226.312.368** | **85%** | **persen** | **Rp246.343.047** | **90%** | **persen** | **Rp212.000.000** | 90% | **persen** | **Rp922.158.371** | **Bidang sarana dan Prasarana Perhubungan Darat** | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun |  | Unit | 2,00 | Unit | Rp71.000.000 | 2,00 | Unit | Rp71.000.000 | 2,00 | Unit | Rp81.000.000 | 2,00 | Unit | Rp121.000.000 | 2,00 | Unit | Rp71.000.000 | 10,00 | Unit | **Rp415.000.000** | seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | n/a | Unit |  | Unit | Rp0 | 30,00 | Unit | Rp50.000.000 | 60,00 | Unit | Rp100.000.000 | 30,00 | Unit | Rp50.000.000 | 30,00 | Unit | Rp50.000.000 | 150,00 | Unit | **Rp250.000.000** | seksi Jaringan dan fasilitas perhubungan darat | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan** | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 2 | Unit | 1,00 | Unit | Rp13.000.000 | 2,00 | Unit | Rp13.000.000 | 2,00 | Unit | Rp13.312.368 | 2,00 | Unit | Rp40.343.047 | 2,00 | Unit | Rp43.000.000 | 9,00 | Unit | **Rp122.655.415** | seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan | Kab. Banjar |  |
|  |  | **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan** | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | n/a | Unit |  | Unit | Rp0 | 20,00 | Unit | Rp19.502.956 | 30,00 | Unit | Rp32.000.000 | 30,00 | Unit | Rp35.000.000 | 35,00 | Unit | Rp48.000.000 | 115,00 | Unit | **Rp134.502.956** | seksi Jaringan dan fasilitas perhubungan darat | Kab. Banjar |  |
|  |  |  | Persentase penurunan kecelakaan transportasi | n/a | persen | **-5,68** | **persen** | **Rp784.505.200** | **-11,36** | **persen** | **Rp771.215.000** | **-17,05** | **persen** | **Rp851.415.000** | **-22,73** | **persen** | **Rp882.468.000** | **-28,41** | **persen** | **Rp882.468.000** | -28,41 | **persen** | **Rp4.172.071.200** | Kabid Lalu Lintas Perhubungan Darat |  |  |
|  |  | **LLAJ 1.3** | ***V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar*** |  |  | **0,4** | **Indeks** | **Rp784.505.200** | **0,39** | **Indeks** | **Rp771.215.000** | **0,38** | **Indeks** | **Rp851.415.000** | **0,37** | **Indeks** | **Rp882.468.000** | **0,36** | **Indeks** | **Rp882.468.000** | **0,36** | **Indeks** | **Rp4.172.071.200** |  |  |  |
|  |  | **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar |  |  | **0,4** | **Indeks** | **Rp260.867.900** | **0,39** | **Indeks** | **Rp716.947.000** | **0,38** | **Indeks** | **Rp762.947.000** | **0,37** | **Indeks** | **Rp800.000.000** | **0,36** | **Indeks** | **Rp800.000.000** | 0,36 | **Indeks** | **Rp3.340.761.900** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 15,00 | Laporan | 5,00 | Laporan | Rp126.947.000 | 5,00 | Laporan | Rp126.947.000 | 5,00 | Laporan | Rp162.947.000 | 5,00 | Laporan | Rp200.000.000 | 5,00 | Laporan | Rp200.000.000 | 25,00 | Laporan | **Rp816.841.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 882,00 | Unit | 21,00 | Unit | Rp128.921.000 | 25,00 | Unit | Rp60.000.000 | 25,00 | Unit | Rp60.000.000 | 25,00 | Unit | Rp60.000.000 | 25,00 | Unit | Rp60.000.000 | 121,00 | Unit | **Rp368.921.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | n/a | Dokumen | 0,00 | Dokumen | Rp0 | 2,00 | Dokumen | Rp30.000.000 | 2,00 | Dokumen | Rp30.000.000 | 2,00 | Dokumen | Rp30.000.000 | 2,00 | Dokumen | Rp30.000.000 | 8,00 | Dokumen | **Rp120.000.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 5,00 | Laporan | 0,00 | Laporan | Rp0 | 12,00 | Laporan | Rp500.000.000 | 12,00 | Laporan | Rp510.000.000 | 12,00 | Laporan | Rp510.000.000 | 12,00 | Laporan | Rp510.000.000 | 48,00 | Laporan | **Rp2.030.000.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3,00 | Laporan | 1,00 | Laporan | Rp4.999.900 | 1,00 | Laporan | Rp5.000.000 | 1,00 | Laporan | Rp8.200.000 | 1,00 | Laporan | Rp8.200.000 | 1,00 | Laporan | Rp8.200.000 | 5,00 | Laporan | **Rp34.599.900** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | **Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin** | **n/a** |  | **65%** | **persen** | **Rp13.450.000** | **70%** | **persen** | **Rp25.000.000** | **75%** | **persen** | **Rp31.000.000** | **80%** | **persen** | **Rp25.000.000** | **85%** | **persen** | **Rp25.000.000** | 85% | **persen** | **Rp119.450.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Penetapan kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | **36,00** | Dokumen | 0,00 | Dokumen | Rp0 | 1,00 | Dokumen | Rp5.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp8.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp5.000.000 | 1,00 | Dokumen | Rp5.000.000 | 4,00 | Dokumen | **Rp23.000.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 36 | Laporan | 0,00 | Laporan | Rp0 | 5,00 | Laporan | Rp5.000.000 | 5,00 | Laporan | Rp8.000.000 | 5,00 | Laporan | Rp5.000.000 | 5,00 | Laporan | Rp5.000.000 | 20,00 | Laporan | **Rp23.000.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yangTerawasi | n/a | Laporan | 5,00 | Laporan | Rp13.450.000 | 10,00 | Laporan | Rp15.000.000 | 15,00 | Laporan | Rp15.000.000 | 20,00 | Laporan | Rp15.000.000 | 25,00 | Laporan | Rp15.000.000 | 75,00 | Laporan | **Rp73.450.000** | seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Andalalin |  |  |
|  |  | **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola** |  |  | **100%** | **Laporan** | **Rp9.268.000** | **100%** | **persen** | **Rp9.268.000** | **100%** | **persen** | **Rp9.268.000** | **100%** | **persen** | **Rp9.268.000** | **100%** | **persen** | **Rp9.268.000** | 100% | **persen** | **Rp46.340.000** | UPT Ter dan Parkir |  |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 | Laporan | 12,00 | Laporan | Rp9.268.000 | 12,00 | Laporan | Rp9.268.000 | 12,00 | Laporan | Rp9.268.000 | 12,00 | Laporan | Rp9.268.000 | 12,00 | Laporan | Rp9.268.000 | 60,00 | Laporan | **Rp46.340.000** | UPT Terminal dan Parkir |  |  |
|  |  | **Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Persentase Ketaatan Pengguna Jalan** | **82%** |  | **83,33%** | **persen** | **Rp500.919.300** | **84,44%** | **persen** | **Rp20.000.000** | **85,56%** | **persen** | **Rp48.200.000** | **86,67%** | **persen** | **Rp48.200.000** | **87,78%** | **persen** | **Rp48.200.000** | 87,78% | **persen** | **Rp665.519.300** |  |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | n/a | Laporan | 4,00 | Laporan | Rp500.919.300 | 1,00 | Laporan | Rp20.000.000 | 2,00 | Laporan | Rp40.000.000 | 2,00 | Laporan | Rp40.000.000 | 2,00 | Laporan | Rp40.000.000 | 11,00 | laporan | **Rp640.919.300** | seksi keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas |  |  |
|  |  |  | Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar | n/a | - | **25,63%** | **persen** | **Rp83.792.400** | **27,07%** | **persen** | **Rp87.144.096** | **28,50%** | **persen** | **Rp90.629.860** | **29,96%** | **persen** | **Rp94.255.054** | **31,33%** | **persen** | **Rp98.025.256** | 31,33% | **persen** | **Rp453.846.666** | Kabid Angkutan Perhubungan Darat |  |  |
|  |  | **Program Pengelolaan Pelayaran** | ***Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal*** | **n/a** | **-** | **22,5%** | **persen** | **Rp19.936.400** | **30%** | **persen** | **Rp23.288.096** | **50%** | **persen** | **Rp26.773.860** | **70%** | **persen** | **Rp30.399.054** | **80%** | **persen** | **Rp34.169.256** | **90%** | **persen** | **Rp134.566.666** |  |  |  |
|  |  | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha** | **Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik** | **n/a** | **-** | **30%** | **persen** | **Rp19.936.400** | **50%** | **persen** | **Rp19.936.400** | **70%** | **persen** | **Rp19.936.400** | **80%** | **persen** | **Rp19.936.400** | **90%** | **persen** | **Rp19.936.400** | 90% | **persen** | **Rp99.682.000** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5,00 | Dokumen | 1,00 | Dokumen | Rp4.996.400 | 1,00 | Dokumen | Rp4.996.400 | 1,00 | Dokumen | Rp4.996.400 | 1,00 | Dokumen | Rp4.996.400 | 1,00 | Dokumen | Rp4.996.400 | 5,00 | Dokumen | **Rp24.982.000** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | n/a | Laporan | 1,00 | Laporan | Rp14.940.000 | 1,00 | Laporan | Rp14.940.000 | 1,00 | Laporan | Rp14.940.000 | 1,00 | Laporan | Rp14.940.000 | 1,00 | Laporan | Rp14.940.000 | 5,00 | Laporan | **Rp74.700.000** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | **Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Sungai dan Danau** | **n/a** | **-** | **0%** | **persen** | **Rp0** | **100%** | **persen** | **Rp3.351.696** | **100%** | **persen** | **Rp6.837.460** | **100%** | **persen** | **Rp10.462.654** | **100%** | **persen** | **Rp14.232.856** | 100% | **persen** | **Rp34.884.666** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | Dokumen | 0,00 | Dokumen | Rp0 | 1,00 | Dokumen | Rp3.351.696 | 1,00 | Dokumen | Rp6.837.460 | 1,00 | Dokumen | Rp10.462.654 | 1,00 | Dokumen | Rp14.232.856 | 4,00 | Dokumen | **Rp34.884.666** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | Laporan | 0,00 | Laporan | Rp0 | 1,00 | Laporan | Rp0 | 1,00 | Laporan | Rp0 | 1,00 | Laporan | Rp0 | 1,00 | Laporan | Rp0 | 4,00 | Laporan | **Rp0** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  |  | **Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak** | **n/a** | **-** | **45%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **75%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **80%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **84%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **88%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **88%** | **persen** | **Rp319.280.000** |  |  |  |
|  |  | **Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | **Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan** | **n/a** | **-** | **64%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **67%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **70%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **74%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **77%** | **persen** | **Rp63.856.000** | **77%** | **persen** | **Rp319.280.000** | **Bidang sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Bidang Angkutan Perhubungan Darat** |  |  |
|  |  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 5 | Unit | 1,00 | Unit | Rp30.000.000 | 1,00 | Unit | Rp27.000.000 | 1,00 | Unit | Rp27.000.000 | 1,00 | Unit | Rp27.000.000 | 1,00 | Unit | Rp27.000.000 | 5,00 | Unit | **Rp138.000.000** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun | 0 | Unit |  | Unit | Rp0 | 1,00 | Unit | Rp3.000.000 | 1,00 | Unit | Rp3.000.000 | 1,00 | Unit | Rp3.000.000 | 1,00 | Unit | Rp3.000.000 | 4,00 | Unit | **Rp12.000.000** | seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan |  |  |
|  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | n/a | Dokumen | 1,00 | Dokumen | Rp32.500.000 | 1,00 | Dokumen | Rp32.500.000 | 1,00 | Dokumen | Rp32.500.000 | 1,00 | Dokumen | Rp32.500.000 | 1,00 | Dokumen | Rp32.500.000 | 5,00 | Dokumen | **Rp162.500.000** | seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan |  |  |
|  |  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 3 | Laporan | 1,00 | Laporan | Rp1.356.000 | 1,00 | Laporan | Rp1.356.000 | 1,00 | Laporan | Rp1.356.000 | 1,00 | Laporan | Rp1.356.000 | 1,00 | Laporan | Rp1.356.000 | 5,00 | Laporan | **Rp6.780.000** | seksi Angkutan Sungai dan Danau |  |  |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKKI Perangkat Daerah | 66,36 | Indeks | 67 | Indeks | 6.928.916.545 | 69 | Indeks | 7.206.073.207 | 71 | Indeks | 7.494.316.135 | 73 | Indeks | 7.794.088.780 | 75 | Indeks | 8.105.852.332 | 75 | Indeks | **Rp37.529.246.999** | Sekretaris |  |  |
|  |  | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp44.770.000** | **100** | **persen** | **Rp46.859.900** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp235.629.900** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dokumen | 2 | Dokumen | 7.859.900 | 2 | Dokumen | 7.859.900 | 2 | Dokumen | Rp8.000.000 | 2 | Dokumen | Rp8.000.000 | 2 | Dokumen | Rp8.000.000 | 10 | Dokumen | **Rp39.719.800** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20 | Dokumen | 4 | Dokumen | 11.555.100 | 4 | Dokumen | Rp12.000.000 | 4 | Dokumen | Rp13.000.000 | 4 | Dokumen | Rp13.000.000 | 4 | Dokumen | Rp13.000.000 | 20 | Dokumen | **Rp62.555.100** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Laporan | 3 | Laporan | 5.223.000 | 3 | Dokumen | Rp6.000.000 | 3 | Dokumen | Rp6.000.000 | 3 | Dokumen | Rp6.000.000 | 3 | Dokumen | Rp6.000.000 | 15 | Dokumen | **Rp29.223.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 | Laporan | 4 | Laporan | 20.132.000 | 4 | Dokumen | 21.000.000 | 4 | Dokumen | 21.000.000 | 4 | Dokumen | 21.000.000 | 4 | Dokumen | 21.000.000 | 20 | Dokumen | **Rp104.132.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | **Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **% Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp6.171.763.345** | **100** | **persen** | **Rp6.171.763.345** | **100** | **persen** | **Rp6.234.316.135** | **100** | **persen** | **Rp6.487.588.780** | **100** | **persen** | **Rp6.654.852.332** | **100** | **persen** | **Rp31.720.283.937** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 | Orang/bulan | 37 | Orang/bulan | 5.544.954.545 | 37 | Orang/bulan | 5.544.954.545 | 37 | Orang/bulan | 5.612.316.135 | 37 | Orang/bulan | 5.863.588.780 | 37 | Orang/bulan | 6.018.352.332 | 37 | Orang/bulan | **Rp28.584.166.337** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | n/a | Dokumen | 12 | Dokumen | 615.400.000 | 12 | Dokumen | 615.400.000 | 12 | Dokumen | Rp610.000.000 | 12 | Dokumen | Rp610.000.000 | 12 | Dokumen | Rp615.000.000 | 60 | Dokumen | **Rp3.065.800.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | n/a | Dokumen | 500 | Dokumen | 0 | 500 | Dokumen | Rp0 | 500 | Dokumen | Rp0 | 500 | Dokumen | Rp2.000.000 | 500 | Dokumen | Rp2.000.000 | 2500 | Dokumen | **Rp4.000.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Laporan | 1 | Laporan | 11.408.800 | 1 | Laporan | 11.408.800 | 1 | Laporan | Rp12.000.000 | 1 | Laporan | Rp12.000.000 | 1 | Laporan | Rp19.500.000 | 5 | Laporan | **Rp66.317.600** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu** | n/a |  | **100** | **persen** | 0 | **100** | **persen** | 23.000.000 | **100** | **persen** | 24.000.000 | **100** | **persen** | 24.000.000 | **100** | **persen** | 24.000.000 | **100** | **persen** | **Rp95.000.000** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | n/a | Dokumen | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | Rp2.000.000 | 1 | Dokumen | Rp2.000.000 | 1 | Dokumen | Rp2.000.000 | 1 | Dokumen | Rp2.000.000 | 5 | Dokumen | **Rp8.000.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | n/a | Laporan | 12 | Laporan | 0 | 12 | Laporan | Rp18.000.000 | 12 | Laporan | Rp18.000.000 | 12 | Laporan | Rp18.000.000 | 12 | Laporan | Rp18.000.000 | 60 | Laporan | **Rp72.000.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | n/a | Laporan | 4 | Laporan | 0 | 4 | Laporan | Rp3.000.000 | 4 | Laporan | Rp4.000.000 | 4 | Laporan | Rp4.000.000 | 4 | Laporan | Rp4.000.000 | 20 | Laporan | **Rp15.000.000** | subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset |  |  |
|  |  | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp20.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp48.000.000** | **100** | **persen** | **Rp212.000.000** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan | n/a | Paket |  | Paket | **Rp0** | 112 | Paket | Rp33.600.000 | 112 | Paket | Rp0 | 112 | Paket | Rp33.600.000 | 112 | Paket | Rp0 | 448 | Paket | **Rp67.200.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | n/a | Dokumen |  | Dokumen |  | 12 | Dokumen | Rp5.000.000 | 12 | Dokumen | Rp5.000.000 | 12 | Dokumen | Rp5.000.000 | 12 | Dokumen | Rp5.000.000 | 48 | Dokumen | **Rp20.000.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | Orang | 4 | Orang | 20.000.000 | 4 | Orang | 48.000.000 | 4 | Orang | 48.000.000 | 4 | Orang | 48.000.000 | 4 | Orang | 48.000.000 | 20,00 | Orang | **Rp212.000.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp217.549.200** | **100** | **persen** | **Rp270.500.000** | **100** | **persen** | **Rp445.000.000** | **100** | **persen** | **Rp436.500.000** | **100** | **persen** | **Rp433.000.000** | **100** | **persen** | **Rp1.802.549.200** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 1 | Paket | 3.935.000 | 1 | Paket | Rp4.500.000 | 1 | Paket | Rp5.000.000 | 1 | Paket | Rp5.500.000 | 1 | Paket | Rp6.000.000 | 5,00 | Paket | **Rp24.935.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 1 | Paket | 15.713.500 | 1 | Paket | 15.000.000 | 1 | Paket | Rp30.000.000 | 1 | Paket | Rp20.000.000 | 1 | Paket | Rp20.000.000 | 5,00 | Paket | **Rp100.713.500** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | n/a | Paket | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | Rp0 | 0 | Paket | Rp0 | 0 | Paket | Rp0 | 0 | Paket | Rp0 | 0,00 | Paket | **Rp0** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | n/a | Paket | 2 | Paket | 19.528.900 | 2 | Paket | Rp20.000.000 | 2 | Paket | Rp25.000.000 | 2 | Paket | Rp25.000.000 | 2 | Paket | Rp20.000.000 | 10,00 | Paket | **Rp109.528.900** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 1 | Paket | 16.011.800 | 1 | Paket | Rp17.000.000 | 1 | Paket | Rp20.000.000 | 1 | Paket | Rp20.000.000 | 1 | Paket | Rp20.000.000 | 5,00 | Paket | **Rp93.011.800** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | n/a | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0,00 | Dokumen | **Rp0** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 | Laporan | 12 | Laporan | 12.360.000 | 12 | Laporan | Rp14.000.000 | 12 | Laporan | Rp15.000.000 | 12 | Laporan | Rp16.000.000 | 12 | Laporan | Rp17.000.000 | 60,00 | Laporan | **Rp74.360.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Laporan | 12 | Laporan | 150.000.000 | 12 | Laporan | Rp200.000.000 | 12 | Laporan | Rp350.000.000 | 12 | Laporan | Rp350.000.000 | 12 | Laporan | Rp350.000.000 | 60,00 | Laporan | **Rp1.400.000.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan** | **100** | **persen** | 100 | persen | 0 | 100 | persen | Rp150.000.000 | 100 | persen | Rp135.000.000 | 100 | persen | Rp135.000.000 | 100 | persen | Rp200.000.000 | 100 | persen | **Rp620.000.000** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 21 | Unit | 0 | Unit | 0 | 21 | Unit | Rp0 | 2 | Unit | Rp50.000.000 | 2 | Unit | Rp70.000.000 | 1 | Unit | Rp450.000.000 | 26 | Unit | **Rp570.000.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | n/a | Unit | 0 | Unit | 0 |  | Unit | Rp150.000.000 |  | Unit | Rp135.000.000 |  | Unit | Rp135.000.000 |  | Unit | Rp200.000.000 | - | Unit | **Rp620.000.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp142.927.000** | **100** | **persen** | **Rp142.927.000** | **100** | **persen** | **Rp150.000.000** | **100** | **persen** | **Rp160.000.000** | **100** | **persen** | **Rp170.000.000** | **100** | **persen** | **Rp765.854.000** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 142.927.000 | 12 | Laporan | 142.927.000 | 12 | Laporan | Rp150.000.000 | 12 | Laporan | Rp160.000.000 | 12 | Laporan | Rp170.000.000 | 60,00 | Laporan | **Rp765.854.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | n/a | Laporan | 0 | Laporan | 0 | 12 | Laporan |  | 12 | Laporan |  | 12 | Laporan |  | 12 | Laporan |  | 48,00 | Laporan | **Rp0** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **% Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **Rp331.907.000** | **100** | **persen** | **Rp353.022.962** | **100** | **persen** | **Rp410.000.000** | **100** | **persen** | **Rp455.000.000** | **100** | **persen** | **Rp528.000.000** | **100** | **persen** | **Rp2.077.929.962** | **Dinas perhubungan** |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 1 | Unit | 38.990.000 | 1 | Unit | 38.990.000 | 1 | Unit | Rp40.000.000 | 1 | Unit | Rp45.000.000 | 1 | Unit | Rp60.000.000 | 1 | Unit | **Rp222.980.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 | Unit | 12 | Unit | 251.320.000 | 12 | Unit | 251.320.000 | 12 | Unit | Rp320.000.000 | 12 | Unit | Rp350.000.000 | 12 | Unit | Rp400.000.000 | 12 | Unit | **Rp1.572.640.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 | Unit | 12 | Unit | 28.620.000 | 12 | Unit | 28.620.000 | 12 | Unit | Rp30.000.000 | 12 | Unit | Rp30.000.000 | 12 | Unit | Rp38.000.000 | 12 | Unit | **Rp155.240.000** | Subbag Umpeg |  |  |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 1 | Unit | 12.977.000 | 1 | Unit | Rp34.092.962 | 1 | Unit | Rp20.000.000 | 1 | Unit | Rp30.000.000 | 1 | Unit | Rp30.000.000 | 1 | Unit | **Rp127.069.962** | Subbag Umpeg |  |  |

**BAB 7**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

q

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk tahun 2021-2026 tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dengan cara mengkonversi kegiatan kedalam renstra yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk data indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator Kinerja Pendukung** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke**  **(persen)** | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi** | **Rasio Konektivitas** | **62,50** | **72,50** | **78,33** | **84,17** | **90,00** | **90,00** |
|  | Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar | 66,57 | 70,21 | 72,45 | 75,16 | 77,86 | 77,86 |
|  | Persentase penurunan kecelakaan transportasi | -5,68 | -11,36 | -17,05 | -22,73 | -28,41 | -28,41 |
|  | Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar | 25,63 | 27,07 | 28,50 | 29,96 | 31,33 | 31,33 |

**BAB 8**

**PENUTUP**

* 1. **Penutup**

Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar (RENJA) Tahun 2021 s/d 2026 dan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sampai tahun 2026.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 s/d 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 s/d 2026 khususnya sektor transportasi.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rencana kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2021-2026, masing masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENSTRA dalam keterkaitannya dengan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2021 s/d 2026.
   1. **Pedoman Transisi Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Periode Dokumen Perencanaan**

Sebagai acuan untuk kegiatan dan program untuk mengisi kekosongan periode dalam masa transisi maka Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menyiapkan beberapa program dan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan di bidang Perhubungan meliputi :

* 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
* Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
* Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
* Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
* Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
* Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
* Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota.
* Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
* Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  1. Program Pengelolaan Pelayaran
* Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.